

**ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PERILAKU TIDAK ETIS STAF AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang)**



DERI YULI

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda September Periode 2013**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PERILAKU TIDAK ETIS STAF AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang)**

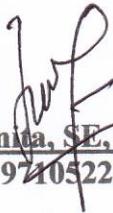
Oleh:

DERI YULI
2008/05245

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

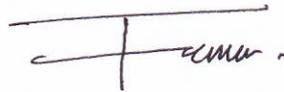
Padang, Juli 2013

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 197405222000032001

Pembimbing II



Fefri Indra Arza SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

**ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP PERILAKU TIDAK ETIS STAF AKUNTANSI
(Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang)**

Deri Yuli

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: yulian_dery@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap perilaku tidak etis staf akuntansi pada pemerintah daerah kota Padang. 2) Pengaruh kesesuaian kompensasi staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang. 3) Pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang. 4) Pengaruh asimetri informasi akuntansi staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang, dan 5) Pengaruh moralitas staf akuntansi terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang.

Kata Kunci: Perilaku Tidak Etis, SPIP, Kesesuaian Kompensasi, Ketaatan Pada Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Moralitas.

Abstract

This research aimed to know 1) The internal control system of government. 2) Appropriateness of compensation, 3) Adherence to accounting rules. 4) accounting information asymmetry and 5) morality accounting staff to unethical behavior in Padang city government. The population is the entire accounting staff work units in SKPD residing in the Padang city, this study uses a sampling technique with judgment sampling. Data were collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. The data analysis technique used is the factor analysis with the help of Statistical Package For Social Science (SPSS).

Keywords: *Unethical Behavior, The Internal Control System Of Government, Appropriateness Of Accounting, adherence To Accounting Rules, Accounting Information Asymmetry ,Morality.*

I. PENDAHULUAN

Akuntansi merupakan sistem yang digunakan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan banyak pihak. Informasi tersebut berupa informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan yang disertai dengan catatan informasi atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan ini banyak sekali terjadi penyelewengan akuntansi yang dilakukan dari etika dan sikap positif seorang akuntan.

Persaingan di dunia pemerintah yang dilandasi oleh nuansa politik telah mempengaruhi akuntan pemerintah melakukan perilaku tidak etis yang dapat merugikan masyarakat, yang dipengaruhi oleh kekuasaan. Perilaku tidak etis dapat kita lihat dari penyajian laporan keuangan, jika laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan fakta dan bersifat materil yang diketahui tidak benar dan dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mengambil kepentingan pribadi maka dapat dikatakan sebagai perilaku tidak etis.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dan pengguna laporan keuangan, karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Keputusan etis merupakan suatu keputusan yang harus dibuat oleh setiap profesional yang mengabdikan pada suatu bidang pekerjaan tertentu, contohnya dalam bidang akuntansi. Kode etik resmi bagi profesional akuntansi adalah Kode Etik Ikatan Akuntansi Indonesia.

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari standar moral. Perilaku tidak etis menghilangkan rasa keadilan dan memberikan dampak yang mencurangi masyarakat seperti terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta mementingkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan kelompok lain. Perilaku tidak etis dalam laporan keuangan terlihat apabila laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dan tidak sesuai dengan fakta dan dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk mengambil kepentingan pribadi.

Etika adalah ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat (Velasques:2004). Etika seseorang akan berpengaruh bagaimana cara mereka memandang sesuatu atau bagaimana cara mereka mempersepsikan sesuatu.

Sistem Pengendalian internal menurut PP No 60 Tahun 2008 adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan aset.

Pengendalian internal yang tersistem dengan baik merupakan alat yang dapat membantu manajemen organisasi dalam melaksanakan tugas atau fungsinya. Sehingga pengendalian internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi atau entitas melalui pengendalian internal yang efektif. Manajemen organisasi dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan pemerintah dapat dicapai.

Perlunya upaya membenahi sistem pengendalian oleh pemerintah daerah terhadap staf akuntansi SKPD merupakan hal yang harus diperhatikan

agar keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dapat pertanggungjawabkan. Salah satunya adalah pada SKPD kota padang yang masih menggambarkan lemahnya laporan keuangan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) perilaku tidak etis atau kecurangan disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern. Jika sistem pengendalian intern lemah maka akan memotivasi staf akuntansi atau akuntan untuk berperilaku tidak etis, seperti mendorong untuk melakukan penyalahgunaan dan penggelapan dana yang mengakibatkan kekayaan atau aset negara yang dikelola pemerintah daerah menjadi tidak terjamin serta efektifitas dan efisiensi kegiatan operasional staf akuntansi SKPD tidak terlihat. Melalui pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan menjamin terciptanya keadilan baik keadilan internal maupun keadilan eksternal para karyawan.

Kompensasi merupakan penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan pada pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi atau lembaga, yang ditujukan untuk membantu agar organisasi dalam meningkatkan keberhasilan kinerjanya.

Pemberian kompensasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis. Jika dikelola dengan baik akan membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara serta menjaga karyawan dengan baik. Sebaliknya tanpa kompensasi yang cukup (sesuai) karyawan yang ada sangat mungkin untuk meninggalkan aktifitas operasionalnya dan mencari peluang untuk mencari keuntungan, akibat dari

ketidakpuasan pembayaran yang dirasa kurang. Hal ini akan meningkatkan keluhan dan mengarah pada tindakan-tindakan yang berbau tidak etis.

Ketaatan menurut (Alwi hasan:2008) berasal dari kata taat yang artinya patuh, tunduk, mematuhi, sedangkan aturan adalah seperangkat hukum, teratur sesuatu yang mengikat. Sedangkan akuntansi menurut Arens (2003) adalah proses pencatatan, pengklasifikasian kejadian-kejadian ekonomi dengan perlakuan logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Taat terhadap aturan-aturan ataupun standar merupakan berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik yang berpengaruh terhadap etika individual. Salah satu ketaatan akuntansi di implikasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertai perilaku tidak etis akuntansi bagi pelaku, selain itu Laporan keuangan penting karena masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi. Kecurangan dalam Laporan keuangan dapat menyesatkan informasi yang diperoleh pemakai laporan keuangan. Penggelapan bahkan korupsi yang dimanipulasi dalam laporan keuangan.

Asimetri informasi akuntansi adalah keadaan dimana bawahan memiliki akses informasi atau porspek lembaga yang tidak diketahui pimpinan atau atasan. Asimetri informasi muncul ketika bawahan lebih mengetahui informasi internal porspek lembaga dimasa yang akan datang dibandingkan dengan atasan.

Anthony dan Govindarajan (2001) menyatakan bahwa kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (agency theory), yaitu principal (pemilik/atasan) memberikan wewenang

kepada agen (manager/bawahan) untuk mengatur perusahaan yang dimiliki.

Asimetri informasi antara atasan dan bawahan memberikan motivasi dan kesempatan bagi bawahan untuk berperilaku tidak etis seperti berbuat curang, dalam merekrut anggaran yang dipublikasikan dan korupsi. Hal ini terjadi ketika bawahan melaporkan informasi yang bias demi kepentingan pribadinya. Sikap curang ini akan merugikan pemakai laporan keuangan karena informasi yang disampaikan dan laporan keuangan yang disusun bawahan tidak akurat (Wilopo : 2006).

Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan. Sehingga dapat mewujudkan pola perilaku yang positif dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan.

Etika dan moralitas berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya, ini berkaitan dengan perintah dan larangan langsung yang bersifat konkret. Semakin tinggi moralitas manajemen semakin rendah kecenderungan untuk melakukan tindakan tidak etis dalam akuntansi, semakin tinggi tahapan moralitas semakin tinggi manajemen memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal daripada memperhatikan kepentingan pribadi. Etika lebih normatif dan oleh karena itu lebih mengikat setiap pribadi manusia. Namun masih terlihat beberapa orang memiliki kecenderungan untuk memilih jalan yang tidak jujur yang didorong oleh faktor ketidakpedulian terhadap orang lain dan untuk memenuhi keinginannya sendiri dalam mencapai kepuasan pribadi. Hal ini tersebut yang menimbulkan hasrat pelaku untuk berperilaku tidak etis.

Dalam teori GONE Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku tidak etis adalah adanya *opportunity* (kesempatan), *need* (kebutuhan) dan *exposure* (pengungkapan). Perilaku tidak etis umumnya didorong oleh adanya kesempatan serta karena tidak adanya konsekuensi terhadap pelaku tidak etis terutama dalam hal pengungkapan.

Untuk mencapai kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan menjamin terciptanya keadilan baik keadilan internal maupun keadilan eksternal para karyawan dan atasan selain diperlukan sistem pengendalian intern yang memadai, kompensasi yang sesuai terhadap manajemen, taat terhadap aturan akuntansi yang berlaku dan moralitas juga harus ada hubungan yang saling berinteraksi antar pimpinan instansi dengan bawahan dalam asimetri informasi akuntansi.

Pelanggaran etika juga terjadi menebar keseluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus-kasus korupsi dan penyelewengan dana pada lembaga pemerintahan. Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan lembaga pemerintah yang sering melakukan pelanggaran etika. Salah satunya di Kota Padang. Laporan keuangan pemerintah kota padang melemah hal ini dibuktikan oleh temuan audit laporan keuangan pemerintah daerah kota padang dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 18 kelemahan dalam laporan keuangan pemerintah kota pemerintah diantaranya temuan laporan keuangan tentang pengelolaan pendapatan asli daerah yang melibatkan lima satuan kerja perangkat daerah. Terkait temuan tersebut kita dapat merekomendasikan

kepada walikota untuk memberikan sanksi kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran karena dinilai tidak melakukan pengendalian serta pengawasan anggaran secara maksimal. BPK juga menemukan keterlambatan laporan keuangan penyetoran pajak hotel ke kas daerah, kelebihan pembayaran anggaran dinas yang mencapai angka Rp. 186,29 juta. (Padek, jumat, 13/07/2012).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh terhadap Perilaku Tidak Etis Staf Akuntansi ” peneliti menfokuskan penelitian di kota Padang karena melihat adanya perilaku tidak etis pada satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan oleh staf akuntansi satuan kerja perangkat daerah di kota padang.

II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS Perilaku Tidak Etis

Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari standar moral. Perilaku tidak etis menghilangkan rasa keadilan dan memberikan dampak yang mencurangi masyarakat seperti terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme serta mementingkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan kelompok lain.

Perilaku etis adalah tindakan yang berbeda dengan tindakan yang mereka percayai yang merupakan tindakan tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Seseorang bertindak tidak etis disebabkan oleh (1) Standar etika seseorang berbeda dengan standar etika yang berlaku di masyarakat (2) Orang memilih untuk bertindak egois.

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang

jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karekteristik yang pribadi pelakunya (Buckley:1998) dalam Wilopo (2006)

Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Tujuan mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Sesuatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat, dan memberikan perasaan senang, atau bahagia (Sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif). Sedangkan buruk merupakan segala yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku dan di katakan sebagai perilaku tidak etis.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah

Menurut Mulyadi (2006) sistem pengendalian internal meliputi sistem organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian internal menurut Bastian (2007) merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan sebagai berikut:

1. Keandalan laporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektifitas dan efesiensi operasi

Wilopo (2006) menjelaskan hubungan pengendalian internal dengan

perilaku tidak etis bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Selanjutnya definisi tentang pengendalian internal tersebut berdasarkan tujuannya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Pengendalian internal akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, meliputi sistem organisasi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Pengendalian internal administratif meliputi sistem organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Mulyadi (2002) pengendalian internal mempunyai lima unsur pokok yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
- 2) Penilaian Resiko
- 3) Aktivitas Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan

Kesesuaian Kompensasi

Menurut Rivai (2010) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada lembaga atau organisasi.

Menurut Giri (2008) dalam Nani (2010) kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan pada karyawan sesuai dengan

pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi atau lembaga tempat ia bekerja.

Menurut Kasmir (2002) kompensasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa.

Tujuan manajemen kompensasi secara umum menurut Rivai (2010) adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tujuan manajemen kompensasi efektif meliputi:

- 1) Memperoleh SDM yang berkualitas
- 2) Mempertahankan karyawan yang ada
- 3) Menjamin keadilan
- 4) Penghargaan terhadap perilaku kerja yang diinginkan
- 5) Mengendalikan biaya
- 6) Mengikuti aturan hukum
- 7) Memfasilitasi efisien administrasi
- 8) Meningkatkan efisien administrasi

Ketaatan pada aturan akuntansi

Ketaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi hasan:2008) berasal dari kata taat yang artinya patuh, tunduk, mematuhi, sedangkan aturan adalah seperangkat hukum, teratur sesuatu yang mengikat. Sedangkan akuntansi menurut Arens (2003) adalah proses pencatatan, pengklasifikasian kejadian-kejadian ekonomi dengan perlakuan logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Sri sulistianto (2008), work and Tearney (1997) dalam Wilopo menjelaskan bahwa kegagalan laporan keuangan yang disebabkan karena ketidaktaatan pada aturan akuntansi yang akan menimbulkan perilaku tidak etis dan menimbulkan kecurangan yang tidak dapat dideteksi oleh auditor.

Dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah agar laporan keuangan mencerminkan keadaan informasi keuangan yang riil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap aturan akuntansi adalah:

1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. O Kompetensi dan Kehati-hatian
5. byektivitas
6. Kerahasiaan
7. Peril Standar Teknis
8. aku Profesional

Asimetri Informasi

Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa datang dibandingkan pemegang saham dan stockholder lainnya. Ketika timbul asimetri keputusan pengungkapan yang dibuat oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan publik.

Asimetri informasi dapat timbul dalam beberapa bentuk (Supriyono:2000)

1. Tanpa pemantauan, hanya agen yang mengetahui apakah ia bekerja dengan baik demi kepentingan prinsipal.
2. Agen mungkin mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan daripada prinsipalnya.
3. Agen dalam melaksanakan tugasnya mungkin diarahkan oleh informasi pribadinya.

Terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya lebih mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan daripada pihak luar
2. *Moral Hazard* yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman, sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika dan norma tidak layak dilakukan.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan pribadi yang didasarkan dari tiga dasar manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*)
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*)
3. Manusia selalu menghindari resiko(*risk adverse*)

Moralitas

Kohlberg (1969) sebagaimana diikuti oleh Velasquez (2002) dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan , yaitu tahapan prakonvensional, tahapan konvensional dan tahapan postkonvensional.

Menurut Bertens (1993) moralitas (berasal dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan moral. Kita berbicara tentang “moralitas suatu perbuatan “ artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan azas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, susila. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak baik.

Menurut Budiningsih (2004) moralitas terjadi apabila orang mengambil yang baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan bukan karena ia mencari keuntungan.

Dalam suatu organisasi perbuatan curang dapat terjadi karena kurangnya kepedulian positif karyawan terhadap perbuatan salah tersebut bahkan dipandang sudah hal yang biasa atau pura-pura tidak mengetahuinya. Kepedulian positif dari lingkungan kerja sangat diperlukan dalam membangun suatu etika perilaku dan kultur organisasi yang kuat. Rendahnya kepedulian dan rendahnya moral menyuburkan tindakan perilaku tidak etis yang pada akhirnya dapat merusak bahkan menghancurkan organisasi (Amrizal:2004)

Menurut Salam (2004) moral berasal dari kata latin 'mores' berasal dari kata 'mos' yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan, berarti moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan yang memuat ajaran tentang baik buruknya perbuatan. Jadi perbuatan itu di nilai sebagai perbuatan yang baik atau sebagai perbuatan yang buruk. Penilaian itu berdasarkan perbuatan yang disengaja.

III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka jenis penelitian ini adalah tergolong pada penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan diteliti atau yang akan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di kota Padang. Berdasarkan data

yang diperoleh dari Struktur Organisasi Tata kerja (SOTK) pemerintah daerah kota Padang. Jumlah Satuan Kerja yang terdapat berjumlah 45 SKPD. SKPD yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan inspektorat.

Dalam penelitian ini teknik sampel ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*), yaitu staf akuntansi SKPD yang akan menjadi responden ditentukan berdasarkan jumlah staf akuntansi pada SKPD. Responden dalam penelitian ini adalah staf akuntansi pada SKPD yang diasumsikan memiliki limaorang staf akuntansi .

Jumlah Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek yang merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh peneliti langsung dari responden penelitian (staf akuntansi pada SKPD kota Padang) melalui angket penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis staf akuntansi.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara survei. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis pada responden untuk menjawabnya. Kuesioner disebar langsung pada responden. Responden diharapkan mengembalikan kuesioner kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan.

Variabel Penelitian

Yang menjadi variabel dalam penelitian adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis staf akuntansi. Faktor tersebut adalah sistem pengendalian intern pemerintah

daerah, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Objek Penelitian

Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai instansi bagian akuntansi pemerintah daerah kota Padang. Kuesioner diantarkan dan dijemput langsung pada responden. Adapun lama penyebaran kuesioner sampai pada pengumpulan kembali kuesioner yang disebar adalah dari tanggal 04 Oktober sampai pada tanggal 22 Oktober 2012.

Uji Kualitas Data

Uji validitas penelitian dilakukan pada 45 satuan kerja perangkat daerah kota Padang. Dimana uji sampel dilakukan pada 36 satuan kerja perangkat daerah yang ada kota Padang. Dengan total responden 88 orang bagian staf akuntansi.

Untuk melihat validitas masing-masing item kuesioner yang disebar digunakan *corrected item-total correlation*. Jika r hitung besar dari r tabel maka data dikatakan valid dan r tabel untuk $n = 88$ adalah 0,1745. Berdasarkan penjumlahan data diperoleh nilai *corrected item-total correlation* untuk masing-masing variabel adalah X_1 (sistem pengendalian internal pemerintah) sebesar .862, X_2 (kesesuaian kompensasi) sebesar .906, X_3 (ketaatan terhadap aturan akuntansi) sebesar .851, X_4 (asimetri Informasi) sebesar .621 dan X_5 (Moralitas) sebesar .848 semua berada di atas r tabel. Dari hal itu dapat dinyatakan bahwa semua item pertanyaan $X_1, X_2, X_3, X_4,$ dan X_5 adalah valid.

Analisis Faktor

Analisis faktor merupakan jenis analisis yang digunakan untuk mengenali dimensi pokok atau keteraturan sebuah fenomena (Kuncoro: 2003). Menurut Idris (2008) analisis faktor adalah jenis analisis yang digunakan untuk meringkas kandungan informasi variabel dalam jumlah besar menjadi sebuah faktor yang lebih kecil.

Matrik Korelasi

Matrik korelasi digunakan mengetahui apakah semua indikator yang akan difaktorkan memiliki korelasi yang erat diantara sesamanya dengan nilai *Keiser-Meyer-Measure of sampling Adequacy* atau KMO-MSA. Dalam penelitian ini KMO-MSA yang diperbolehkan adalah sebesar .772 atau lebih dari 0,5 (lebih besar dari 0,5) sehingga semua indikator dapat di proses lebih lanjut.

Sedangkan untuk mengetahui seberapa besar hubungan diantara setiap indikator dapat dilihat pada tabel Anti-image Matrices. Pada tabel 19 ini terlihat semua nilai KMO besar dari 0,5 yang berarti semua indikator memiliki korelasi yang erat dan dapat dilanjutkan kedalam analisis berikutnya.

Angka KMO and bartlett's berdasarkan tabel 19 menunjukkan .772 dengan signifikansi .000 yang berarti angka KMO and bartlett's tersebut memenuhi batas angka KMO and bartlett's 0.5 ($.772 > 0.5$) dan dengan signifikansi .000 yang berada jauh dibawah 0.5 ($.000 < 0.5$) yang dapat disimpulkan bahwa variabel dan sampel yang ada dapat dianalisis lebih lanjut. Angka Anti-image Correlation menunjukkan MSA yang berada diatas 0,5. Yaitu untuk X_1 (sistem pengendalian intern pemerintah) sebesar .750, X_2 (Kesesuaian kompensasi) sebesar .818, X_3 (Ketaatan terhadap aturan akuntansi) sebesar .838, X_4 (Asimetri Informasi) sebesar

.566 dan X5(Moralitas) sebesar .742. Hal ini juga menunjukkan variabel dan sampel yang ada dapat dianalisis lebih lanjut.

Communalities

Communalities merupakan jumlah varian yang dimiliki oleh semua variabel yang dianalisis atau sebagai proporsi yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor umum. Semakin kecil communalities sebuah variabel berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk nilai communalities

Berdasarkan perhitungan tabel 21 di atas dapat diketahui bahwa faktor pertama X1 (sistem pengendalian intern pemerintah) dengan nilai Extraction .748. berarti sekitar 74.8% dari indikator ini dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Untuk X2 (kesesuaian kompensasi) dengan nilai Extraction .660 yang berarti sekitar 6.60% dari indikator ini dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Untuk X3 (ketaatan terhadap aturan akuntansi) dengan nilai Extraction .680 yang berarti sekitar 68 % dari indikator ini dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Untuk X4 (Asimetri Informasi) dengan nilai Extraction .912 yang berarti sekitar 91.2% dari indikator ini dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. X5 (Moralitas) dengan nilai Extraction .780 yang berarti sekitar 78% dari indikator ini dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk.

Penentuan Jumlah Faktor

Penentuan jumlah faktor didasarkan pada eigenvalue besar dari 1. Eigenvalues menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varian setiap variabel yang di analisis. Untuk menghitung varians kelima variabel maka angka eigenvalues untuk kelima variabel adalah sama

dengan total kelima variabel. Penentuan pembentukan faktor di dasarkan pada kriteria angka eigenvalues yang berada di bawah 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk

Faktor pertama memiliki nilai total eigenvalues sebesar 1.332 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan oleh faktor ini adalah sebesar 1.332 sedangkan nilai *percent of varians* 26.643 berarti faktor 1 dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 26.643 %. Dimana hal ini dapat disimpulkan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis.

Faktor kedua memiliki nilai total eigenvalues sebesar 1.137 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan oleh faktor ini adalah sebesar 1.137 sedangkan nilai *percent of varians* 22.739 berarti faktor 2 dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 22.739 %. Dimana hal ini kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis

Faktor ketiga memiliki nilai total eigenvalues sebesar 1.064 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan oleh faktor ini adalah sebesar 1.064 sedangkan nilai *percent of varians* 18.773 berarti faktor 3 dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 18.773 %. ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa hanya tiga faktor yang terbentuk atau faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis staf akuntansi. Sedangkan untuk faktor keempat dan faktor kelima bukan merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis staf akuntansi.

Pembahasan

Dari analisis diatas sering disebut sebagai *confirmatory factor analysis* . karena tujuannya ingin mencari faktor

yang paling dominan yang mempengaruhi perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota padang. Langkah selanjutnya adalah interpretasi dan mengimplementasikan masing-masing faktor yang dijelaskan oleh variabel yang berkorelasi membentuk suatu faktor.

Nilai faktor loading mencerminkan besarnya korelasi antara variabel dengan faktor yang bersangkutan. Semakin tinggi faktor loading menunjukkan semakin erat hubungan variabel dengan faktor tersebut. Berikut ini akan dijelaskan implementasi faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis staf akuntansi pada SKPD pada pemerintah daerah di kota padang.

Dari analisis faktor terhadap data primer diperoleh tiga faktor yang mempengaruhi perilaku tidak etis dari lima faktor yang di analisis pada pemerintah daerah kota Padang melalui *rotated component matrix*.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perilaku tidak etis atau dapat disimpulkan pengendalian internal pemerintah merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi perilaku tidak etis. sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas lima variabel, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

Dalam lingkungan pengendalian ada indikator yang dapat menjelaskan keeratan pengaruh terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian indikator pertama keharusan menegakkan integritas dalam instansi memberikan pengaruh

yang dominan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Dengan demikian diartikan bahwa keharusan menegakkan integritas dalam instansi merupakan komponen dalam melaksanakan pengendalian internal pemerintah. Indikator kedua yang menjelaskan keeratan pengaruh terhadap sistem pengendalian internal pemerintah adalah Pimpinan dan staf akuntansi SKPD memelihara dan menjaga nilai etika. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini dikategorikan cukup mempengaruhi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah. Walau pelaksanaannya dalam SKPD kota Padang terlihat belum sepenuhnya.

Indikator ketiga dalam lingkungan pengendalian adalah adanya menerapkan aturan perilaku pada setiap tingkatan. Berdasarkan hasil penelitian adanya menerapkan aturan perilaku pada setiap tingkatan telah terlaksana dengan sangat baik dalam pengendalian internal pemerintah. Artinya aturan perilaku telah diterapkan pada setiap tingkatan. Indikator keempat adalah staf akuntansi SKPD bekerja sesuai dengan tugas-tugas kasubag instansi yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD. Berdasarkan hasil penelitian staf akuntansi SKPD bekerja tidak sesuai dengan tugas-tugas kasubag instansi yang ditetapkan oleh Pimpinan SKPD. Dengan demikian dapat diartikan pelaksanaan indikator ini rendah dalam pengendalian internal pemerintah atau indikator ini pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik.

Indikator kelima dalam lingkungan pengendalian adalah staf akuntansi SKPD mengikuti pelatihan yang diadakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaan. Berdasarkan hasil penelitian indikator memberikan pengaruh yang kuat terhadap

lingkungan pengendalian. Dimana dalam pelaksanaan pada SKPD kota Padang dikategorikan sangat baik. Artinya staf akuntansi SKPD mengikuti pelatihan yang diadakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaan.

Variabel kedua dalam sistem pengendalian internal pemerintah adalah penilaian resiko. Indikator pertama yang berpengaruh dalam penilaian resiko adalah staf akuntansi SKPD mengikuti arahan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh dan sangat baik dalam pelaksanaannya pada sistem pengendalian internal pemerintah dalam penilaian resiko. Artinya staf akuntansi SKPD mengikuti arahan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko yang ada dalam sistem pengendalian internal pemerintah. Indikator kedua yang berpengaruh dalam penilaian resiko adalah staf akuntansi SKPD mengikuti Penetapan tujuan yang diberikan Pimpinan SKPD berdasarkan tujuan dan rencana strategis instansi. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh dan sangat baik dalam pelaksanaannya pada sistem pengendalian internal. Artinya dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal staf akuntansi SKPD mengikuti Penetapan tujuan yang diberikan Pimpinan SKPD berdasarkan tujuan dan rencana strategis instansi. Indikator ketiga adalah staf akuntansi SKPD dalam mengidentifikasi resiko harus menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan SKPD tersebut. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang cukup baik dalam penilaian resiko. Artinya indikator ini belum maksimal dilaksanakan pada SKPD kota Padang.

Variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang ketiga adalah aktivitas pengendalian.

Indikator dalam variabel ini adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam SKPD harus tertulis dan di ketahui pimpinan SKPD dan penyelenggaraan pengendalian ditujukan untuk mereview kinerja instansi. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini tidak memberikan pengaruh yang baik terhadap aktivitas pengendalian, dan dapat disimpulkan indikator dalam variabel aktivitas pengendalian tidak berpengaruh terhadap aktivitas pengendalian.

Informasi dan komunikasi merupakan variabel keempat dalam sistem pengendalian internal pemerintah. Dimana indikator pertama dalam variabel ini adalah pimpinan SKPD menyediakan sarana komunikasi yang layak digunakan staf akuntansi SKPD. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini cukup memberikan pengaruh terhadap informasi dan komunikasi dalam sistem pengendalian internal pemerintah. Artinya pimpinan SKPD belum sepenuhnya menyediakan sarana komunikasi yang layak digunakan staf akuntansi SKPD. Indikator kedua adalah Pimpinan SKPD mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus. Namun berdasarkan hasil penelitian indikator ini juga cukup memberikan pengaruh terhadap informasi dan komunikasi dalam sistem pengendalian internal. Artinya Pimpinan SKPD tidak mengembangkan dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

Pemantuan adalah variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang terakhir dalam penelitian ini. Dimana variabel ini terdiri atas tiga indikator. Indikator yang pertama adalah pimpinan SKPD melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini cukup memberikan pengaruh terhadap variabel Pemantuan dalam sistem pengendalian

internal pemerintah. Namun pelaksanaannya masih tergolong rendah, artinya pimpinan SKPD tidak selalu melakukan pemantauan terhadap sistem pengendalian internal pemerintah. Indikator kedua variabel Pemantuan adalah pimpinan SKPD melakukan pengawasan terpisah oleh pengawas intern pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh cukup baik pada variabel pemantuan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah. Artinya pimpinan SKPD telah melakukan pengawasan terpisah oleh pengawas intern pemerintah. Indikator ketiga adalah pimpinan SKPD melakukan tindak lanjut rekomendasi terhadap hasil audit. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terkait. Artinya pimpinan SKPD tidak melakukan tindak lanjut rekomendasi terhadap hasil audit. Hal ini dapat disimpulkan indikator ini bukan merupakan indikator dari variabel pemantauan.

Pengendalian internal merupakan suatu alat yang dapat membantu manajemen organisasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja melalui etika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bastian (2007) sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas dan segenap personil) yang mendesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu 1)Keandalan laporan keuangan, 2)Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan 3)Efektifitas dan efisiensi operasi.

Melalui pengendalian internal yang efektif manajemen organisasi dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan telah dilaksanakan

dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dan meminialisir terjadinya perilaku tidak etis serta memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia dalam tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Dari hasil penelitian pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang terlihat sistem pengendalian internal pemerintah telah berjalan dengan baik seperti adanya keharusan menegakkan integritas pada instansi. Namun penyediaan sarana komunikasi yang layak digunakan staf akuntansi SKPD masih kurang mendukung pengendalian internal pada SKPD tersebut.

Kesesuaian Kompensasi

Faktor kedua yang mempengaruhi perilaku tidak etis adalah kesesuaian kompensasi . Kesesuaian kompensasi merupakan faktor kedua yang dominan mempengaruhi perilaku tidak etis. Pemberian kompensasi merupakan suatu bentuk balas jasa atas hasil kerja kontribusi jasa terhadap lembaga atau instansi tempat mereka bekerja. Untuk menghindari terjadinya tindakan perilaku tidak etis. Pemberian kompensasi yang sesuai akan membantu pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, memperoleh dan memelihara serta menjaga karyawan dengan baik.

Kesesuaian kompensasi dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel dimana setiap variabel memiliki indikator. Variabel pertama adalah gaji, dengan indikator staf akuntansi SKPD menerima tunjangan dan kompensasi sesuai dengan kinerja masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang cukup baik

terhadap variabel terkait dalam kesesuaian kompensasi. Artinya staf akuntansi SKPD menerima tunjangan dan kompensasi berdasarkan kinerja masing-masing. Indikator kedua adalah staf akuntansi SKPD menerima tunjangan dan kompensasi karena telah patuh. Sesuai dengan hasil penelitian indikator ini juga memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap variabel terkait dalam kesesuaian kompensasi. Artinya staf akuntansi SKPD menerima tunjangan dan kompensasi berdasarkan kepatuhannya. Indikator ke tiga adalah staf akuntansi SKPD menerima bonus karena telah menjadi suatu kelaziman di SKPD. Sesuai dengan hasil penelitian indikator ini tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terkait dalam kesesuaian kompensasi. Artinya staf akuntansi SKPD menerima bonus bukan karena telah menjadi suatu kelaziman di SKPD. Indikator terakhir dalam variabel ini adalah pimpinan SKPD memberikan promosi jabatan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini cukup memberikan pengaruh terhadap variabel terkait dalam kesesuaian kompensasi. Artinya pimpinan SKPD kadang memberikan promosi jabatan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai.

Menurut Rivai (2010) tujuan manajemen kompensasi secara umum adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuan keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin terciptanya keadilan internal dan eksternal. Tujuan ini dimaksud

adalah agar memperoleh SDM yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, memberikan penghargaan terhadap perilaku, mengendalikan biaya, mengikuti aturan hukum, memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi administrasi.

Dari hasil penelitian pendapat Rivai sesuai dengan fenomena yang ada, staf akuntansi SKPD menerima tunjangan dan kompensasi sesuai dengan kinerja masing-masing. Hal ini dapat dikatakan kinerja karyawan yang etis didukung oleh adanya kompensasi yang sesuai yang diberikan instansi. Sehingga terhindar dari perilaku tidak etis.

Ketaatan Terhadap Aturan Akuntansi

Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan faktor ketiga yang dominan mempengaruhi perilaku tidak etis. Ketaatan terhadap aturan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan agar penyajian laporan keuangan terbebas dari salah saji materi dan jauh dari tindakan tidak etis.

Ketaatan terhadap aturan akuntansi terdiri dari delapan variabel dengan satu indikator untuk masing-masing variabel. Variabel pertama adalah tanggung jawab profesi dengan indikator staf akuntansi SKPD mempertimbangkan kepentingan laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang baik terhadap variabel terkait. Artinya staf akuntansi SKPD selalu mempertimbangkan kepentingan laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan.

Variabel kedua adalah kepentingan publik dengan indikator staf akuntansi SKPD menyusun laporan keuangan demi mempertimbangkan

kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator variabel ini memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap variabel terkait. Artinya dalam menyusun laporan keuangan staf akuntansi SKPD mempertimbangkan kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah. Variabel ketiga adalah integritas dengan indikator staf akuntansi SKPD merasa suatu kesulitan untuk mengungkapkan (Disclosure) seluruh kejadian atau transaksi keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator variabel ini cukup memberikan pengaruh terhadap variabel terkait. Namun dalam pelaksanaannya indikator ini belum berjalan dengan baik.

Objektivitas merupakan variabel ke empat dalam ketaatan terhadap aturan akuntansi, dengan indikator staf akuntansi SKPD harus berusaha membebaskan diri dari berbagai pengaruh kepentingan tertentu dari pihak lain yang bertentangan dengan ketentuan akuntansi. Sesuai hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang baik terhadap variabel terkait. Variabel ke lima adalah kompensasi dan kehati-hatian dengan indikator staf akuntansi SKPD dalam pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan berusaha bertindak hati-hati yang didasarkan pada keahlian. Berdasarkan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang baik terhadap variabel terkait.

Variabel ke enam dalam ketaatan terhadap aturan akuntansi adalah kerahasiaan dengan indikator staf akuntansi SKPD bersedia bila di minta sebagai saksi di depan pengadilan untuk mengungkapkan rahasia dan kejadian laporan keuangan yang sebenarnya. Sesuai dengan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap variabel terkait. Artinya staf akuntansi SKPD bersedia bila di minta sebagai saksi di depan pengadilan untuk mengungkapkan rahasia dan

kejadian laporan keuangan yang sebenarnya. variable ke tujuh adalah perilaku profesional dengan indikator Staf akuntansi SKPD tidak harus mentaati aturan akuntansi secara konsisten apabila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas penanggung jawab penyusunan laporan keuangan . sesuai dengan hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap variabel terkait. Artinya staf akuntansi bekerja sesuai dengan indikator yang disebutkan.

Variabel ke delapan dalam ketaatan terhadap aturan akuntansi adalah kerahasiaan dengan indikator staf akuntansi SKPD dalam kenyataannya tidak perlu menggunakan standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Dalam hasil penelitian indikator ini memberikan pengaruh yang baik. Artinya staf akuntansi SKPD dalam kenyataannya perlu menggunakan standar akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya staf akuntansi SKPD kota Padang menyusun laporan keuangan yang mempertimbangkan kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah. Maka dari itu, ketaatan aturan akuntansi dalam kinerja individual staf akuntansi SKPD kota Padang telah berjalan baik, yang berarti staf akuntansi SKPD kota Padang jauh dari perilaku tidak etis dalam menyusun laporan keuangan. Taat terhadap aturan-aturan ataupun standar merupakan berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik yang berpengaruh terhadap etika individual.

Hal ini juga sesuai menurut (Alwi hasan:2008) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketaatan berasal dari kata taat yang artinya patuh, tunduk, mematuhi, sedangkan aturan adalah seperangkat hukum, teratur sesuatu yang

mengikat. Dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah daerah harus mengikuti standar-standar akuntansi pemerintah agar laporan keuangan mencerminkan keadaan informasi keuangan yang riil dan jauh dari tindakan tidak etis.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “ Analisis Faktor–Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis Staf Akuntansi” (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang) ini adalah sebagai berikut:

1. sistem pengendalian internal pemerintah memiliki lima variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang. Lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan informasi dan komunikasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh negatif yang sangat dominan terhadap perilaku tidak etis. Variabel pemantauan memiliki dua indikator yang memberikan pengaruh dalam variabelnya terhadap perilaku tidak etis. Sedangkan variabel aktivitas pengendalian tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku tidak etis.
2. kesesuaian kompensasi memiliki empat variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang. Gaji, upah dan kompensasi tidak langsung merupakan variabel yang memberikan pengaruh negatif

yang sangat dominan terhadap perilaku tidak etis. Sedangkan variabel insentif tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku tidak etis

3. ketaatan pada aturan akuntansi memiliki delapan variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang. Seluruh variabel ketaatan pada aturan akuntansi memberikan pengaruh dalam variabelnya terhadap perilaku tidak etis.
4. asimetri informasi tidak berpengaruh positif terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang.
5. Moralitas tidak berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis pada pemerintah daerah kota Padang.

Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sistem pengendalian internal pemerintah telah diterapkan cukup maksimal, sehingga rendahnya perilaku tidak etis dihasilkan oleh pemerintah yang menerapkan sistem pengendalian internal. Namun demikian Pemerintah harus lebih meningkatkan sistem pengendalian internal dalam menyusun dan melaporkan keuangan daerah. Selain itu Pimpinan SKPD juga hendaknya menyediakan sarana komunikasi yang layak digunakan pada staf akuntansi SKPD.
2. Mengenai kesesuaian kompensasi memang sudah dinilai baik, namun pemerintah belum sepenuhnya efektif memberikan kompensasi karena

- pemberian kompensasi masih ada yang berdasarkan suatu kelaziman di SKPD.
3. Ketaatan terhadap aturan akuntansi staf akuntansi telah menunjukkan nilai nilai yang baik. Tetapi hendaknya staf akuntansi SKPD tidak merasa suatu kesulitan untuk mengungkapkan (*Disclosure*) seluruh kejadian atau transaksi keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Agar memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
 4. SKPD untuk menerapkan Asimetri informasi dimana asimetri informasi dapat membrikan informasi yang relevan baik dari atasan maupun dari bawahan.
 5. Penelitian ini masih terbatas pada analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tidak etis untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan variabel penelitian dan penelitian ulang mengenai variabel yang bertolak belakang dengan hipotesis untuk menemukan variabel-variabel lain yang paling dominan berpengaruh kuat terhadap perilaku tidak etis pada SKPD kota Padang.
 6. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian atau peneliti dapat memilih SKPD yang berada di luar Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi. Hasan, dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. Jakarta: Melalui Google.co.id. [17 Desember 2011]
- Bertens, K.1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia.
- Budiningsih, Asri C.2004. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indra Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Mulyadi S. 2006. *Auditing Buku satu Jilid 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nani ,Wilaya. 2010. Pengaruh Moralitas Motivasi dan Sistem Pengendalian Internal Aparatur Pemerintah Terhadap Tingkat Kecurangan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Rivai, Veithzal dan Ella Jauvani Sagala. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi Padang IX*.(Diakses pada tanggal 17 November 2011)
- Velasques,Manuel.G. 2004. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Factor Analysis

[DataSet0]

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.772
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	148.386
	df	10
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

	SPI	Kesesuaian kompensasi	Ketaatan terhadap aturan akuntansi	Asimetri Informasi	Moralitas
Anti-image Covariance					
SPI	.434	-.044	-.097	-.123	-.218
Kesesuaian kompensasi	-.044	.666	-.148	.149	-.113
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	-.097	-.148	.541	-.021	-.136
Asimetri Informasi	-.123	.149	-.021	.907	-.016
Moralitas	-.218	-.113	-.136	-.016	.392
Anti-image Correlation					
SPI	.750 ^a	-.082	-.200	-.196	-.528
Kesesuaian kompensasi	-.082	.818 ^a	-.247	.192	-.221
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	-.200	-.247	.838 ^a	-.030	-.296
Asimetri Informasi	-.196	.192	-.030	.566 ^a	-.027
Moralitas	-.528	-.221	-.296	-.027	.742 ^a

Anti-image Matrices

	SPI	Kesesuaian kompensasi	Ketaatan terhadap aturan akuntansi	Asimetri Informasi	Moralitas
Anti-image Covariance					
SPI	.434	-.044	-.097	-.123	-.218
Kesesuaian kompensasi	-.044	.666	-.148	.149	-.113
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	-.097	-.148	.541	-.021	-.136
Asimetri Informasi	-.123	.149	-.021	.907	-.016
Moralitas	-.218	-.113	-.136	-.016	.392
Anti-image Correlation					
SPI	.750 ^a	-.082	-.200	-.196	-.528
Kesesuaian kompensasi	-.082	.818 ^a	-.247	.192	-.221
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	-.200	-.247	.838 ^a	-.030	-.296
Asimetri Informasi	-.196	.192	-.030	.566 ^a	-.027
Moralitas	-.528	-.221	-.296	-.027	.742 ^a

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

	Initial	Extraction
SPI	1.000	.748
Kesesuaian kompensasi	1.000	.660
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	1.000	.680
Asimetri Informasi	1.000	.912
Moralitas	1.000	.780

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.480	29.607	29.607	1.480	29.607	29.607	1.354	27.078	27.078
2	1.092	21.843	51.450	1.092	21.843	51.450	1.121	22.418	49.496
3	1.003	20.066	71.516	1.003	20.066	71.516	1.101	22.020	71.516
4	.822	16.444	87.960						
5	.602	12.040	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
SPI	.474	-.553	-.117
Kesesuaian kompensasi	.648	.565	-.090
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	-.330	.690	.718
Asimetri Informasi	.361	-.496	.668
Moralitas	.773	.264	.142

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 3 components extracted.

Rotated Component Matrix^a

	Component		
	1	2	3
SPI	.071	-.606	.415
Kesesuaian kompensasi	.851	-.010	-.148
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	-.028	.864	.168
Asimetri Informasi	.033	.018	.906
Moralitas	.789	-.079	.241

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3
1	.821	-.428	.377
2	.570	.583	-.580
3	.028	.691	.722

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPI	88	35	75	60.49	8.011
Kesesuaian kompensasi	88	15	20	16.94	1.368
Ketaatan terhadap aturan akuntansi	88	29	40	33.30	2.330
Asimetri Informasi	88	14	15	14.98	.150
Moralitas	88	17	25	21.33	2.766
Valid N (listwise)	88				